

# REINVENTING GOVERNMENT MANAGEMENT PADA KANTOR CAMAT LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN

Surya Dailiati, Sudaryanto  
Universitas Lancang Kuning  
e-mail: surya-dailiati@unilak.ac.id

## Abstract

*Langgam sub-district as one of the 12 sub-districts in Pelalawan District since the last 5 years continue to experience significant growth. Therefore, this research is conducted in Langgam District, especially this area is the hometown of the current Regent that is HM Harris. Various development programs have been implemented Pelalawan District Government to be able to turn this isolated village into a more advanced with the availability of roads and bridges. However, based on pre-survey conducted there are still some problems, namely: the lack of government facilities and infrastructure built by the government, the lack of private sector activities in Kecamatan Langgam and the lack of local products. To overcome this problem is done by qualitative descriptive approach. The theory used, according to David Osborn and Ted Gebler in Sinambela (2014), needs to apply ten principles of reinventing government management. District Government Langgam Pelalawan District has implemented Reinventing Government Management (Change Management Government) in carrying out daily tasks. It's just not in accordance with the wishes of the community. Positive things that seem to have been done diantaranya in terms of fulfillment of apparatus resources so as to be able to fill the ideal organizational structure.*

**Keywords:** *Reinventing, Government, Management*

## Abstrak

*Kecamatan Langgam sebagai salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan sejak 5 tahun terakhir terus mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langgam, apalagi daerah ini merupakan kampung halaman dari Bupati yang menjabat saat ini yakni HM Harris. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sehingga mampu menyulap kampung yang terisolir ini menjadi lebih maju dengan tersedianya jalan dan jembatan. Namun berdasarkan pra survey yang dilakukan masih terdapat beberapa permasalahan yakni: masih kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun oleh pemerintahan, masih minimnya kegiatan sektor swasta di Kecamatan Langgam dan minimnya kemunculan produk masyarakat lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan, menurut David Osborn dan Ted Gebler dalam Sinambela (2014), perlu diterapkan sepuluh prinsip reinventing government management. Pemerintah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan Reinventing Government Management (Perubahan Manajemen Pemerintahan) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hanya saja belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal positif yang nampak telah terlaksana diantaranya dari segi pemenuhan sumber daya aparatur sehingga mampu mengisi struktur organisasi secara ideal.*

**Kata Kunci :** *Reinventing, Government and Management*

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, baik pusat dan daerah tengah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Salah satunya dapat diwujudkan melalui *Reinventing Government Management* (perubahan/ menciptakan lagi/ mengkreasikan kembali manajemen pemerintahan). *Reinventing*

*Government Management* yang disingkat dengan Regom, pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pemerintahan serta memberdayakan masyarakat.

Kecamatan Langgam sebagai salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan sejak 5 tahun terakhir terus mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langgam, apalagi daerah ini merupakan kampung halaman dari Bupati yang menjabat saat ini yakni HM Harris.

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sehingga mampu menyulap kampung yang terisolir ini menjadi lebih maju dengan tersedinya jalan dan jembatan. Namun berdasarkan pra survey yang dilakukan masih terdapat beberapa permasalahan yakni:

- Masih kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun oleh pemerintahan.
- Masih minimnya kegiatan sektor swasta di Kecamatan Langgam.
- Minimnya kemunculan produk masyarakat lokal.

Permasalahan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan umumnya dan Kecamatan Langgam khususnya. Dengan demikian kebergantungan masyarakat terhadap sosok Bupati Pelalawan saat ini yang kebetulan dari Langgam bisa secara berangsur berkurang. Sebab dalam dunia politik kemunculan pemimpin tidak selamanya berasal dari daerah yang sama, sehingga dikhawatirkan ketika mencul dari luar daerah, maka giat pembangunan dirasakan tidak akan sama.

Konsep administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas dan kegiatan dari berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan secara sistematis dalam organisasi. Proses administrasi secara hierarki mengerjakan tiga fungsi utama, yaitu (1) fungsi pengarahan organisasi yang berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang, (2) fungsi manajemen organisasi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan, sarana, instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi, (3) fungsi pengawas, yaitu kontroling dan evaluasi atasan kepada bawahan dengan cermat, tegas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar, (Asep, 2012).

Sementara organisasi menurut Robbins dan Judge dalam Danang dan Burhanuddin (2011), adalah suatu unit social yang terdiri dari dua orang atau lebih, dikoordinasi secara sadar dan berfungsi dalam suatu dasar yang relative terus menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan. Agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien maka dibutuhkan manajer.

Manajer sebagai bagian dari sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Byars dan Rue dalam Siti dan Tri (2013), adalah aktivitas yang mencakup pengadaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia. Sedangkan pengertian sumber daya manusia menurut Jackson dan Schuler dalam Byars dan Rue (2013), adalah orang yang berbakat dan bersemangat tinggi yang tersedia bagi organisasi sebagai kontributor potensial untuk menciptakan dan merealisasikan tujuan, misi dan visi organisasi.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam menjalankan organisasi. Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Perencanaan dalam arti sempit, sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan *foresight* itu, yaitu kemampuan mengukur (*measuring*). Ini perencanaan yang ideal sesungguhnya adalah mengukur, (Riant dan Randy, 2011).

Begitu pula dalam rangka pembangunan wilayah seperti kantor camat diperlukan perencanaan yang ideal. Sebab kantor camat memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan salah satunya pariwisata. Dalam hal ini menurut Bambang (2013), keterkaitan sektor pariwisata terutama menyangkut aspek pemanfaatan sumber daya, dukungan sarana dan prasarana dan infrastruktur, dukungan SDM, dukungan kebijakan kemudahan perijinan, investasi serta bentuk – bentuk regulasi lainnya.

Dalam hal ini tidak terlepas dari ilmu politik yang sudah setiap hari aktifitasnya kita saksikan diberbagai media baik cetak maupun elektronik. Menurut Padmo dan Nazaruddin (2009), ilmu politik merupakan bagian dari usaha manusia yang berkesinambungan untuk memahami dirinya. Setiap tindakan politik melibatkan beberapa nilai politik pokok yang mendasarinya. Adalah tepat bahwa renungan pokok para ilmuwan politik, sejak plato sampai awal abad kedua puluh, tertuju pada nilai-nilai yang dipandang sebagai penting bagi warga negara yang baik dan negara yang adil.

Selanjutnya, hal ini akan dipengaruhi dengan system politik yang berlaku di suatu negara. Seperti Indonesia dengan sistem politik demokrasi Pancasila, akan berbeda pelaksanaan sistem politiknya dengan negara lain, katakanlah Malaysia. Menurut Beddy (2012), system politik adalah suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi dibidang politik yang kegiatannya menyangkut penentu kebijakan umum (*public policies*) dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan negara atau pemerintahan. Kemudian, berinteraksi berdasarkan proses-proses (proses saling pengaruh mempengaruhi) yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Di Indonesia semuanya harus mengacu kepada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar tidak timbul hal yang negatif. Oleh karena itu Pancasila harus dipahami dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena dalam UU No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No 43/ Dikti/ Kep/ 2006, dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, Kaelan (2010).

Tapi semua harus paham dengan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Sebab setelah seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara otomatis orang tersebut menjadi warga Negara. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Di Indonesia hak warga Negara terhadap negaranya telah diatur dalam UUDN RI 1945, diantaranya hak azasi manusia, (Subhan dan Asep; 2011).

Bagi masyarakat Indonesia umumnya yang identic dengan Islam, begitu pula di Riau, seorang warga Negara harus menjaga diri agar berahlaq yang baik. Menurut Abu dan Noor (2008), ahlaq atau system perilaku ini terjadi melalui satu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya ahlaq itu harus terwujud. Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya ahlaq itu, disusun oleh manusia didalam system idenya. Sistem ide ini adalah hasil proses daripada kaidah-kaidah yang dihayati dan dirumuskan sebelumnya. Kaidah atau norma yang merupakan ketentuan ini timbul dari satu sistem nilai yang terdapat dalam Al quran dan Sunnah.

Disisi lain, manusia selanjutnya melakukan penelitian untuk menjawab berbagai persoalan. Penelitian (*research*) berasal dari kata Perancis (kuno) *recherchier* atau *recherche* yang berarti mencari atau menemukan. Menurut Shuttleworth dalam Muri (2014), *research* dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, informasi dan fakta untuk kemajuan pengetahuan. Sedangkan Woody seperti yang dikutip Whitney, menyatakan *research* dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan atau suatu upaya penemuan (*inquiry*) yang dilakukan secara hati-hati dan atau secara kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip; suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu.

Sementara monitoring atau pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengetahui kualitas, efektifitas, efisiensi, capaian dan dampak dari sebuah program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Conor dalam Agus dkk (2012), menjelaskan, bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring.

Pihak yang melakukan pengawasan haruslah yang memiliki legalitas. Azas legalias merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan

kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum dalam system kontinental. Dengan demikian (Ridwan; 2010), substansi azas legalitas adalah wewenang, yakni; kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Menurut Deddy Mulyadi (2015), kunci utama memahami good governance dalam pandangan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah pemahaman atas prinsip – prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip – prinsip tersebut kata Hardjasoemantri dalam Deddy Mulyadi (2015) meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menurut David Osborn dan Ted Gebler dalam Sinambela (2014), ada sepuluh prinsip Regom, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh
2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani
3. Pemerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan memasukkan
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan.
7. Pemerintahan wirausahaan: menghasilkan ketimbang membelanjakan.
8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati
9. Pemerintahan berorientasi pasar: mendorong perubahan pasar melalui pasar.
10. Mengumpulkan semua menjadi satu.

## 2. METODE

Penelitian dilakukan di Kantor Camat Langgam Kabupaten Pelalawan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor Camat Langgam Kabupaten Pelalawan. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus untuk aparatur pemerintah dan *simple random sampling* untuk pengunjung/ masyarakat yang mengurus administrasi. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul berdasarkan jenis dan bentuk data, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pemerintah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan Reinventing Government Management (Perubahan Manajemen Pemerintahan) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hanya saja belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal positif yang nampak telah terlaksana diantaranya dari segi pemenuhan sumber daya aparatur sehingga mampu mengisi struktur organisasi secara ideal. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana dalam urusan kantor bagi internal aparat maupun masyarakat yang melakukan urusan administrasi.

Sedangkan hal negatif dalam pelaksanaan Reinventing Government Management adalah Pemerintah Kecamatan khususnya aparat belum bisa mengelola sumber daya yang ada sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Seperti profil desa online yang belum terdata secara akurat dengan kementerian dalam negeri. Kemudian potensi pasar dan alam lainnya yang terabaikan sehingga belum dimanfaatkan secara berdaya dan berhasil guna.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara aparatur pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan Reinventing Government Management. Sebab ini tidak bisa dilakukan hanya satu pihak pemerintah saja tanpa dukungan dari swasta sebagai mitra dan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan layanan dari pemerintah. Dengan demikian reinventing government management yang dimaksudkan dirasakan oleh semua pihak. Misalnya dari manajemen tertutup menjadi manajemen terbuka, dari manual menjadi digital teknologi, dari pasif menjadi aktif. Reinventing government management bagi Pemerintah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan merupakan suatu keharusan karena daerah ini memiliki berbagai potensi dan kini tengah giat menjalankan roda pembangunan.

### Pembahasan

Menurut David Osborn dan Ted Gebler dalam Sinambela (2014), ada sepuluh prinsip Regom, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh

Prinsip ini dalam pelaksanaan reinventing government management, Pemerintah Kecamatan Langgam telah melaksanakan, hanya saja belum mencapai target yang diharapkan. Katalis yang dilakukan dalam bentuk program pembangunan rumah layak. Dari penelitian yang dilakukan banyak rumah layak huni yang telah dibangun dan diserahkan ke warga tidak ditempati sebagaimana mestinya. Bahkan banyak yang lapuk dan dibiarkan saja oleh penghuninya. Padahal untuk membangun rumah layak huni ini diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Kemudian katalis dalam pemanfaatan lahan pertanian yang masih belum berjalan dengan baik. Padahal potensi lahan sangat besar guna mendukung swasembada pangan.

2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani

Sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945, masyarakat diberikan hak untuk mendirikan organisasi dan ini mesti disambut dengan baik. Sebab dengan kondisi saat ini keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) baik dalam bentuk paguyuban, organisasi kepemudaan atau lainnya. Namun ini kurang disambut dengan baik oleh masyarakat, sebagai bukti keberadaan ormas masih sangat minim yang ada hanya lembaga formal pemerintah.

Oleh karena itu perlu diwujudkan dengan membangun ormas yang dapat membantu pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Kecamatan dapat memberikan kewenangan tersebut kepada ormas agar masyarakat dapat maju dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti pendirian lembaga perbedayaan masyarakat/ LPM.

3. Pemerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan

Menurut Sekretaris Camat Langgam, As Ari SSos yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (FIA Unilak), berbagai usaha telah dilakukan dalam menciptakan persaingan yang sehat dalam berbagai tingkatan, hasilnya memuaskan.

Kecamatan Langgam sudah berhasil melaksanakan prinsip pemerintahan yang kompetitif dalam berbagai tingkatan. Di mulai dari kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Kedepan diharapkan meraih hasil yang lebih baik lagi hingga nasional sehingga bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. Tentunya kalau bisa hingga pada tataran internasional.

“Kita inginnya masyarakat Kecamatan Langgam dapat meningkatkan pendidikannya lebih tinggi lagi dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian secara otomatis diharapkan prestasi lainnya juga akan berhasil diraih,” demikian dikatakan As Ari.

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.

Visi Kecamatan Langgam mengacu kepada Visi Kabupaten Pelalawan yakni terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang sejahtera, mandiri, inovatif, dan berdaya saing global secara berkelanjutan dalam masyarakat inklusif yang beradab, beriman, bertaqwa dengan mengembangkan nilai budaya Melayu tahun 2025. Dengan demikian seluruh stake holder terkait berusaha untuk mewujudkan visi ini dengan menerapkan misi/ cara mencapai tujuan, diantaranya meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan bermartabat dan berbudaya.

Hal ini dituangkan dalam peraturan daerah/ perda Kabupaten Pelalawan yang akhirnya menjadi rujukan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya visi Kecamatan Langgam sendiri adalah Menjadikan Kantor Camat Langgam Sebagai Pusat Pelayanan Publik Terbaik Yang Berbasis Tertib Administrasi, Bersih Akuntabel, Inovatif Dengan Tetap Menjaga Kredibilitas Aparatur.

Visi yang dibangun ini sudah sangat baik sesuai dengan konsep *reinventing government management*. Hal ini diwujudkan pula dengan menyediakan pelayanan publik terbaik serta menyediakan ruang informasi publik yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya menciptakan kepuasan masyarakat dalam pelayanan serta perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Di Kantor Camat Langgam juga sudah dilakukan pelayanan satu atap sebagai perpanjangan dari Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah menciptakan lingkungan kantor dan ibukota kecamatan yang bersih, indah, sehat jasmani dan rohani. Begitu pula dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai agama dan budaya.

5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan memasukkan

Orientasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan diantaranya penyediaan fasilitas umum dan sosial. Kedua fasilitas ini sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti tempat ibadah, sebagai daerah yang identik nuansa agamis maka keberadaan rumah ibadah sangat diperlukan guna menciptakan sumber daya aparatur yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sarana sosial yang ingin dipenuhi tentunya sebagai jawaban pemberian pelayanan publik

kepada masyarakat yang tidak hanya terikat dengan administrasi semata. Artinya, perlu keseimbangan antara pelayanan administrasi umum dan penyediaan fasilitas sosial.

6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kebutuhan pelanggan disini yang dimaksud adalah kebutuhan masyarakat atau publik, baik masyarakat sebagai warga sipil maupun masyarakat swasta yang menjalankan aktifitas ekonomi. Kedua unsur ini sangat penting bagi kehidupan dan pembangunan di Kecamatan Langgam, tanpa adanya masyarakat kehidupan akan mati, tanpa adanya aktifitas ekonomi, masyarakat akan miskin.

Dari sisi administrasi negara, kebutuhan masyarakat dalam memenuhi aspirasinya diwujudkan dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai utusan masyarakat. Badan ini berperan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengawasi jalannya program dan kegiatan yang ada di desa. Selain BPD di Kecamatan Langgam juga tersedia Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). KPM berperan dalam memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pendampingan administrasi.

7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan.

Usaha – usaha yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Langgam dalam pengembangan dunia kewirausahaan sudah mulai tampak. Namun dari segi hasil belum terwujud. Hal ini bisa dilihat dari masih sepi nya pasar dan kegiatan industri dan pemanfaatan lahan pertanian.

Pemerintah Kecamatan Langgam memiliki tanah kas desa atau areal lainnya untuk kepentingan desa/ kelurahan dalam bentuk tanah kering seluas 58 hektar. Namun kondisinya saat ini belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi pendapatan pemerintah. Bahkan pemanfaatan atau pengelolaan belum dilakukan secara nyata. Oleh karena itu diperlukan peran dari berbagai pihak seperti BPD dan KPM dalam merubahnya sehingga reinventing government management dapat berjalan dengan baik.

Reinventing government management atau perubahan/ perbaikan/ pengkreasian pengelolaan pemerintah perlu dilakukan di daerah ini guna mengangkat Kecamatan Langgam yang sempat terisolir menjadi maju. Sebab daerah ini sebelum ada jembatan yang menghubungkan antara Langgam dan Pangkalan Kerinci dipisahkan oleh Sungai Kampar. Namun dengan terpilihnya HM Harris sebagai Bupati Kabupaten Pelalawan, maka arah pembangunan banyak terfokus ke daerah ini sebab HM Harris merupakan putra daerah Langgam.

8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati

Pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Langgam diantaranya dalam bentuk kerusakan jalan. Dimana di kecamatan ini terdapat 3 kelas jalan yakni jalan aspal/ beton, diperkeras dan jalan tanah. Dari usaha yang telah dilakukan jalan aspal/ beton dan diperkeras tidak mengalami kerusakan sedangkan jalan tanah sepanjang 1 km mengalami kerusakan.

Usaha yang dilakukan dalam pencegahan kerusakan jalan diantaranya memberlakukan ketentuan jenis muatan kendaraan yang tidak boleh melebihi kekuatan jalan. Sebab jika melebihi kekuatan jalan maka akan menyebabkan kerusakan jalan. Usaha lain yang dilakukan adalah dengan memberikan batasan terhadap kendaraan perusahaan agar tidak masuk.

9. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan pasar melalui pasar.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Langgam, Eduardo SSos, saat ini terdapat tiga jenis pasar yakni ; umum, permanen/ bangunan dan tanpa bangunan/ semi permanen. Pasar umum terdiri atas 7 buah, permanen 108 buah dan semi permanen 15 buah sedangkan jumlah kios sebanyak 173 buah.

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa belum semua pasar yang ramai aktifitasnya. Bahkan masih banyak toko/ kios/ warung yang masih kosong. Kondisi ini yang perlu mendapat perhatian pemerintah agar pasar menjadi ramai. Sebab dengan ramainya pasar maka aktifitas perekonomian berjalan dengan lancar dan masyarakat menjadi sejahtera.

“Kita senantiasa mendorong masyarakat untuk bisa tampil berusaha, sehingga mereka tidak hanya mengharapkan anak – anaknya menjadi pegawai negeri sipil. Kalau masyarakat kreatif, tidak berladang mereka dapat memanfaatkan pasar yang ada untuk dagang,” kata Eduardo.

10. Mengumpulkan semua menjadi satu.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat bentuk Reinventing Government Management yang digunakan adalah dengan pelayanan satu atap, yang terpusat di Kantor Camat Langgam. Selain itu juga berdiri Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. UPTD yang ada di Kecamatan Langgam adalah:

Dengan hadirnya UPTD ini di Kecamatan Langgam memudahkan masyarakat untuk melaksanakannya urusannya sesuai dengan kepentingan/ kebutuhan masing-masing. Masyarakat tidak perlu lagi ke ibukota kabupaten yakni Pangkalan Kerinci untuk pengurusan administrasi. Hal ini sangat menguntungkan semua pihak baik aparatur pemerintah setempat maupun masyarakat. Tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga menjadi unsur reinventing government management.

#### 4. KESIMPULAN

1. Reinventing Government Management telah berjalan dengan baik di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
2. Hambatan dalam Reinventing Government Management kurang signifikan yakni pemanfaatan pasar yang belum menjadi perhatian pemerintah setempat.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan Reinventing Government Management adalah penguatan UPTD yang ada di Kecamatan Langgam.

#### 5. SARAN

1. Disiplin dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga pasar dapat terkola dengan baik, karena masih ada pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai jadwal.
2. Kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Langgam dengan *stake holders* terkait sehingga reinventing government management menjadi dipahami semua pihak dan berjalan dengan baik sesuai dengan visi yang sudah ada.
3. Dukungan sektor swasta dalam peningkatan regom.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [2]. Agus Dkk, 2012, *Modul Monitoring Penegakan Hukum*, ICW, Jakarta
- [3]. Anggara Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- [4]. Beddy Iriawan, 2012. *Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- [5]. Danang Sunyoto dan Burhanuddin, 2011, *Perilaku Organisasional*, CAPS, Yogyakarta.
- [6]. Deddy Mulyadi, 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.



- [7]. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta
- [8] MPR RI, 2012, Ketetapan MPR RI Nomor I/ MPR/ 2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 -2002, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- [9]. Padmo Wahjono dan Nazaruddin Syamsuddin, 2009, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [10] Riant Nugroho dan Randy Wrihatnolo, 2011, Manajemen Perencanaan Pembangunan, Kompas Gramedia, Jakarta.
- [11] Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [12] Sinambela dkk, 2014, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.
- [13] Siti Fajar dan Tri Heru, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- [14] Subhan Sofhian dan Asep Sahid, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan, Fokus Media, Bandung.
- [15] Wibowo, 2010, Budaya Organisasi, Rajawali Pres, Jakarta.
- [16] Yusuf Muri, 2014, Metode Penelitian; Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Prenada Media Grup, Jakarta.